Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Jadwal Mulai Tahapan pilkada Sumbar 2020 Belum Jelas

Padang, Padangkita.com-Semua tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 di Sumatera Barat (Sumbar), telah berhenti sejak dua bulan lalu. Sejauh ini belum ada tanda-tanda akan dimulainya kembali tahapan tersebut.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, Izwaryani mengatakan, KPU Sumbar saat ini masih menunggu keputusan dari KPU Pusat terkait penundaan tersebut.

Sebab, kata dia, keputusan untuk melakukan penundaan semua tahapan pilkada tersebut sebelumnya merupakan keputusan dari KPU Pusat.

“Untuk kapan dimulainya, belum ada kepastian, tentu kita menunggu keputusan dari KPU Pusat,” ujar Izwaryani kepada Padangkita.com melalui sambungan telepon, Selasa (12/5/2020).

Soal perkiraan kapan dimulainya, ia mengatakan, pihaknya tidak dapat memastikan kapan tahapan tersebut akan dimulai kembali.

Hal itu berkaitan dengan perkembangan Covid-19 yang hingga saat ini penyebaran masih masif di seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sumbar.

Selain itu, kata izwaryani, KPU Pusat tentunya juga mempertimbangkan perkembangan Covid-19 untuk memulai kembali tahapan Pilkada 2020. Yang artinya tahapan tersebut akan bisa dimulai setelah Pandemi Covid-19 dinyatakan berakhir.

“KPU Pusat tentu menunggu status kedaruratan bencana dicabut oleh pemerintah,” tutur Izwaryani.

Perlu diketahui, sebelumnya KPU Pusat mengambil langkah untuk menghentikan semua tahapan dalam Pilkada 2020.

Kebijakan itu menyusul perkembangan virus Corona atau Covid-19 di berbagai daerah di Indonesia semakin meluas.

Penundaan tertuang dalam Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.(mfz)

Sumber Berita :

Padangkita.com, 12 Mei 2020

Catatan Berita :

- Pelaksanaan dan anggaran Pilkada diatur sesuai dengan UU RI No 8 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang dan Permendagri nomor 51 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2015 tentang pengelolaan dana kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota
- Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagaimana disebut sebagai Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang.
- Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI
- Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil
- Pemilihan diselenggarakan melalui dua tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan
- Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
- Tugas dan wewenang KPU diantaranya yaitu berwenang untuk menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah; dan memfasilitasi pelaksanaan

tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pemilihan jika provinsi, kabuoaten dan kota tidak dapat melanjutkan tahapan pemilihan secara berjenjang